

# JURNAL ILMIAH **BINANIAGA**

**Jeffry**

Penerapan Sistem Pembelian dalam Kaitannya dengan Sistem Pengeluaran Kas terhadap Efektifitas Pengendalian Intern (Studi Kasus pada PT. Bogor Raya Development)

**M. Nur Rizqi**

Peranan Software Accurate dalam Menunjang Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus pada CV. Nuansa Elektronik)

**Jeffry**

Evaluasi Atas Penerapan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset)

**Asna Manullang**

Analisa Harga Emas terhadap Pendapatan Sewa Modal Periode 2008-2010 pada Perum Pegadaian Cabang Blok A Jakarta

**Waluyo**

Pengaruh Pelayaran Pajak, Persepsi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

**Yuli Anwar**

Peranan Analisis Laporan Keuangan dalam Mengevaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT. Bank Jabar Banten Tahun 2007-2009

**Waluyo**

Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak



ISSN 0216-4094



**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) BINANIAGA  
BOGOR**

## ISI / CONTENT

Halaman / Page

|   |           |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR / PREFACE .....  | i         |
| ISI / CONTENT .....   | ii        |
| Penelitian / Research :   |           |
| <b>Jeffry</b>   |           |
| Penerapan Sistem Pembelian dalam Kaitannya<br>dengan Sistem Pengeluaran Kas terhadap Efektifitas Pengendalian Intern<br>(Studi Kasus pada PT. Bogor Raya Development) .....         | 1 – 20    |
| <b>M. Nur Rizqi</b>   |           |
| Peranan Software Accurate dalam Menunjang<br>Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus pada CV. Nuansa Elektronik) .....  | 21 – 42   |
| <b>Jeffry</b>   |           |
| Evaluasi Atas Penerapan Sistem Akuntansi Satuan Kerja<br>Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor<br>(Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) ..... | 43 – 70   |
| <b>Asna Manullang</b>   |           |
| Analisa Harga Emas terhadap Pendapatan<br>Sewa Modal Periode 2008 – 2010 pada Perum Pegadaian Cabang Blok A Jakarta .....   | 71 – 88   |
| <b>Waluyo</b>   |           |
| Pengaruh Pelayanan Pajak, Persepsi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak,<br>dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....                            | 89 – 98   |
| <b>Yuli Anwar</b>   |           |
| Peranan Analisis Laporan Keuangan dalam Mengevaluasi Kinerja<br>Keuangan Perusahaan pada PT. Bank Jabar Banten Tahun 2007 – 2009 .....  | 99 – 114  |
| <b>Waluyo</b>   |           |
| Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak .....  | 115 – 122 |

Penelitian / Research

## PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Oleh:

Waluyo

*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana  
Jln. Raya Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat Telp. (021) 5861779  
e-mail : waluyo9@yahoo.com*

---

**Abstract.** The role of taxes in National Revenue and Expenses Budget continues to increase on all state revenues from year to year. The purpose of this study was to analyze the influences of the Tax Examination and Tax Billing in partially and simultaneously of the Tax Revenue.

Object in this research is the Tax Service Office Pratama Kosambi for the period 2008 – (Semester I) 2012. The sample was selected by Convenience Sampling Method. Data that use in this research is secondary data, such as Realization of Tax Examination, Target of Tax Examination, Realization of Tax Arrears Disbursement, Amount of Tax Arrears; Realization and Target of Tax Revenue for Income Tax, Value Added Taxes and / Sales Tax on Luxury Goods issued by the Tax Service Office.

The results of this research are: (1) Tax Examination has significant influence to Tax Revenue, (2) Tax Billing has significant influence to Tax Revenue, (3) Tax Examination and Tax Billing simultaneously have significant influence to Tax Revenue.

---

Keywords: Tax Examination, Tax Billing, Tax Revenue

### PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Negara yang adil dan sejahtera diperlukan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan penerimaan Negara yang cukup besar dalam membiayai pembangunan. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Dengan peran pajak yang semakin besar membutuhkan sistem pengelolaan pajak yang semakin baik diharapkan penerimaan pajak semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

Hasil penerimaan pajak akan memiliki peranan penting untuk membiayai pembangunan negara. Pajak dibayar oleh rakyat dan hasilnya dipergunakan untuk rakyat. Sumber pembiayaan pembangunan

dari sektor perpajakan menjadi andalan pemerintah. Data bersumber dari Kementerian Keuangan menunjukkan, bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan memiliki kontribusi sebesar 78,84 % dari total penerimaan negara. Perkembangan penerimaan negara dari sektor perpajakan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana tersaji pada tabel 1.

Waluyo : Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

**Tabel 1**  
**Perkembangan Penerimaan Pajak**  
**(Dalam Rupiah)**

Syahab (2012) dan Sari (2012) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

| Tahun         | Penerimaan Perpajakan | Penerimaan Bukan Pajak | Hibah | Jumlah      | % Penerimaan Pajak |
|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|
| (1)           | (2)                   | (3)                    | (4)   | 2+3+4 = (5) | 2÷5 = (6)          |
| 2006          | 409,2                 | 226,9                  | 1,8   | 637,9       | 64,15 %            |
| 2007          | 490,9                 | 215,2                  | 1,7   | 707,8       | 69,36 %            |
| 2008          | 658,7                 | 320,6                  | 2,3   | 981,6       | 67,10 %            |
| 2009          | 619,9                 | 227,2                  | 1,7   | 848,8       | 73,03 %            |
| 2010          | 723,3                 | 268,9                  | 3,0   | 995,2       | 72,68 %            |
| 2011          | 878,7                 | 286,6                  | 4,7   | 1.170       | 75,10 %            |
| 2012 (target) | 1.019,3               | 272,7                  | 0,8   | 1.292,8     | 78,84 %            |

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Data tentang perbandingan penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kecenderungan peningkatan tersebut adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk.

Dalam Reformasi Perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia diubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dengan perubahan sistem pemungutan pajak pihak otoritas pajak memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kewenangan yang penuh diberikan kepada wajib pajak, perlu dilakukan pengujian pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pemeriksaan pajak. Kewenangan pemeriksaan pajak diberikan oleh undang-undang kepada Direktur Jendral Pajak.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak diharapkan dapat berdampak positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Penagihan pajak juga dilakukan sebagai sarana pencairan tunggakan pajak, meliputi pemberitahuan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan/atau menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Efektivitas penagihan pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Nugraha (2011), Fitriani (2009), dan Syahab (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa peran pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sangat penting dalam manajemen atau pengelolaan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Oleh karena itulah perlu kiranya meneliti dalam lingkungan kantor pelayanan pajak:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah pemeriksaan dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak?

## TELAAH LITERATUR

### Penerimaan Pajak.

Pajak mempunyai dua fungsi, menurut Waluyo (2011), yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regular*). Sebagai fungsi penerimaan, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran

*Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak*

pemerintah, dan fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, fungsi penerimaan sebagai fungsi utama, pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Saat ini, sekitar 75% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak.

### **Pemeriksaan Pajak.**

Pengertian pemeriksaan pajak sesuai dengan Pasal 1 angka 25 undang – undang KUP bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pengertian tersebut, fokus dari pemeriksaan pajak yaitu pada kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakan dalam menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong, menyeter dan melapor seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan umumnya dilakukan berdasarkan kebijakan otoritas pajak, sehingga pemeriksaan pajak sangatlah selektif, sebagai contoh kebijakan pemeriksaan pajak yang ditujukan kepada wajib pajak tertentu. Kemungkinan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menggali potensi usaha tertentu, mengingat potensinya masih rendah

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan, pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak tetapi secara sampling.

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan pajak akan diterbitkan laporan hasil pemeriksaan pajak. Laporan pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi Kurang Bayar, Lebih Bayar, atau Nihil.

Perhitungan besarnya pajak terutang menurut laporan pemeriksaan pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis atas pemberitahuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan tanggapan,

pemeriksa pajak bersama dengan wajib pajak membahas hasil akhir pemeriksaan (*Closing Conference*). Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak menghadiri pembahasan hasil akhir pemeriksaan, surat ketetapan pajak diterbitkan secara jabatan dan disampaikan kepada Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak sependapat, dapat mengajukan Keberatan atas surat ketetapan pajak tersebut.

Berdasarkan kajian teori dan tujuan penelitian, maka Hipotesis dapat dirumuskan:

**H<sub>1</sub> : Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak.**

### **Penagihan Pajak.**

Dalam undang-undang KUP memberikan batasan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita sedangkan pihak yang berkewajiban secara hukum melunasi utang pajak yaitu penanggung pajak. Pengertian penanggung pajak Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa agar tunggakan pajak dapat dicairkan.

Berdasarkan kajian teori dan tujuan penelitian, maka Hipotesis dapat dirumuskan:

**H<sub>2</sub> : Penagihan Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak.**

*W a l u y o : Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak*

Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak mempunyai kaitan erat sesuai dengan fungsi masing-masing. Suatu bentuk pengujian kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai perundangan ini dengan perpajakan melalui pemeriksaan pajak. Dari hasil pemeriksaan pajak perlu ditindaklanjuti dengan tindakan penagihan.

Berdasarkan kajian teori dan tujuan penelitian, maka Hipotesis dapat dirumuskan:

**H<sub>3</sub> : Pemeriksaan Pajak dan Penagihan secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.**

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bertujuan menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap suatu variabel dependen.

Adapun dari statistik deskriptif memberikan gambaran atas variabel yang ada di dalam penelitian ini, yang terdiri dari pemeriksaan, penagihan, dan penerimaan pajak. Hasil Uji Statistik Deskriptif sebagaimana tersaji dalam tabel 2.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

| Descriptive Statistics |    |            |             |              |                |
|------------------------|----|------------|-------------|--------------|----------------|
|                        | N  | Minimum    | Maximum     | Mean         | Std. Deviation |
| Penerimaan             | 54 | .52850860  | 1.92021910  | 1.0965870019 | .28296039096   |
| Pemeriksaan            | 54 | .007217277 | 2.281095300 | .71831577604 | .558467783397  |
| Penagihan              | 54 | .10074669  | .35279524   | .2100668902  | .07744133313   |
| Valid N (listwise)     | 54 |            |             |              |                |

Sumber: Data diolah

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dilakukan di lingkungan kantor pelayanan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode *Causal Study* yang bertujuan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak dan dengan variabel independen Pemeriksaan dan Penagihan Pajak. Semua variabel dalam penelitian diukur menggunakan skala ratio. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Pelayanan Pajak. Data berupadata Realisasi dan TargetPenerimaan Pajak; data pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan Realisasi Ketetapan Hasil Pemeriksaan. Target Pemeriksaan; data penagihan pajak yang berkaitan dengan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dan Jumlah Tunggakan Pajak.

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa nilai minimum dari Penerimaan Pajak sebesar 0,528 dan nilai maksimumnya sebesar 1,920 dengan rata-rata sebesar 1,096 atau 109,66% dan standar deviasi sebesar 0,282. Nilai minimum dari Pemeriksaan Pajak adalah 0,007 dan nilai maksimumnya sebesar 2,281 dengan rata-rata sebesar 0,718 atau 71,83% dan standar deviasi sebesar 0,558. Nilai minimum dari Penagihan Pajak adalah 0,100 dan nilai maksimumnya sebesar 0,325 dengan rata-rata sebesar 0,210 atau 21% dan standar deviasi sebesar 0,077.

Hasil Uji Multikolonieritas dengan menggunakan perhitungan nilai *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)* sebagaimana tersaji dalam tabel 3.

*Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak*

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                   | Collinearity Statistics |       |
|-------|-------------------|-------------------------|-------|
|       |                   | Tolerance               | VIF   |
| 1     | (Constant)        |                         |       |
|       | Pemeriksaan Pajak | .789                    | 1.268 |
|       | Penagihan Pajak   | .789                    | 1.268 |

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 3, semua variabel independen memiliki nilai Tolerance 0,789 atau di atas 0,10 dan nilai VIF 1,268 atau di bawah angka 10. Sehingga tidak ada multikolinieritas di antara variabel independen dalam model regresi. Sedangkan hasil Uji Autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (Dw test) sebagaimana tersaji dalam tabel 4.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Durbin-Watson**

**Model Summary<sup>p</sup>**

| Model | Durbin-Watson |
|-------|---------------|
| 1     | 1.848         |

a. Predictors: (Constant), Penagihan, Pemeriksaan

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah

Hasil pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ditemukan nilai Adjusted R Square sebagaimana tersaji dalam tabel 5.

Dari hasil pengujian koefisien determinasi didapatkan nilai R sebesar 0,76. Dari nilai R menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah kuat, karena nilai tersebut berada dalam kriteria nilai dengan interval koefisien 0,60 – 0,799. Nilai Adjusted R Square pada tabel sebesar 0,562 yang menunjukkan bahwa sebesar 56,2% variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak, dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, yaitu Pemeriksaan dan Penagihan Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 43,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**(Adjusted R Square)**

**Model Summary<sup>p</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .760 <sup>a</sup> | .578     | .562              | .18731013020               |

a. Predictors: (Constant), Penagihan, Pemeriksaan

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 4 diketahui bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,848. Nilai DW pada tabel DW dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah variabel independen (k) adalah 2 (dua), maka nilai (du) yang didapat berdasarkan tabel sebesar 1,641. Oleh karena, nilai DW 1,848 lebih besar dari du, yaitu 1,641 dan kurang dari 2,359 (4-1,641 (4-du)), maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Uji Statistik F yang dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar  $\alpha = 0,05$ , hasil ujinya sebagaimana tersaji dalam tabel 6.

*W a l u y o : Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak*

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Statistik F**

ANOVA<sup>b</sup>

| Model      | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Regression | 2.454          | 2  | 1.227       | 34.975 | .000 <sup>a</sup> |
| Residual   | 1.789          | 51 | .035        |        |                   |
| Total      | 4.244          | 53 |             |        |                   |

a. Predictors: (Constant), Penagihan, Pemeriksaan

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah

Hasil Uji Statistik F bahwa nilai F sebesar 34,975 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa H3 diterima bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen yang terdiri atas pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugraha (2011) yang berhasil membuktikan bahwa pemeriksaan dan penagihan pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Sedangkan Hasil Uji Statistik t sebagaimana tersaji dalam tabel 7.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Statistik t**

Coefficients<sup>a</sup>

| Model       | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|             | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| (Constant)  | .567                        | .074       |                           | 7.631 | .000 |
| Pemeriksaan | .189                        | .052       | .373                      | 3.645 | .001 |
| Penagihan   | 1.874                       | .374       | .513                      | 5.009 | .000 |

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh hasil persamaan regresi dalam penelitian ini:

$$Y = 0,567 + 0,189X_1 + 1,874X_2 + e$$

Berdasarkan Hasil Uji Statistik t yang terlihat pada Tabel 7, dapat dikemukakan penjelasan mengenai bukti empiris, yaitu sebagai berikut:

1. Diperoleh koefisien regresi sebesar 0,189 untuk variabel pemeriksaan pajak, oleh karena itu, untuk setiap kenaikan Realisasi Ketetapan Hasil Pemeriksaan sebesar 1 % akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak sebesar 0,189 atau 18,9%. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi pengaruh yang positif antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak. Hasil Uji Statistik t menunjukkan nilai t sebesar 3,645 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini berarti H<sub>1</sub> diterima, sehingga pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahab (2012) dan Sari (2012) yang berhasil membuktikan bahwa pemeriksaan pajak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

2. Diperoleh koefisien regresi sebesar 1,874 untuk variabel penagihan pajak. Oleh karena itu, untuk setiap kenaikan Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 1 % akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak sebesar 1,874. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi pengaruh yang positif antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak. Hasil uji statistik t menunjukkan nilai t sebesar 5,009 dengan tingkat signifikansi sebesar

*Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak*



0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini berarti  $H_2$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak yang dilihat dari pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2011), Fitriani (2009), dan Syahab (2008) yang berhasil membuktikan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara individual maupun bersama-sama berpengaruh pada penerimaan pajak. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Demikian juga penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan secara bersama-sama berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal ini membuktikan pentingnya upaya intensif dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui pemeriksaan pajak dan upaya pencairan tunggakan melalui penagihan pajak yang intensif. Tetapi upaya pendukung lainnya tetap harus dilakukan terutama pelayanan pajak prima kepada wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Asri Fika. 2008. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama". Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 12. Palembang.
- Andriyanto, R. Weddie. 2008. "Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak". Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan, Vol.1 No. 2, Maret 2008, Hal. 123-137.
- Devano, Sony & Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*.

Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Erwis, Nana Adriana. 2012. "Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan". Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Fitriani, Dina W. 2009. "Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu)". *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol.3 No.2 Oktober 2009, Hal. 135-149.
- Ginting, Riskon. 2006. "Pengaruh Pemberian Surat Penagihan terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak". *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol. 5, No.1, Maret 2006, Hal. 11-20.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi ke 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermawan, Asep. 2009. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif (Edisi Revisi)*. Jakarta: Grasindo.
- Ilyas, Wirawan & Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi ke 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Kosasih. 2008. "Analisis Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak pada Kantor Pajak XXX". *Jur. Man.* Volume 6, Nomor 2, Maret 2008: 271-286.
- Krisbianto, Ervina. 2007. "Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak". Skripsi Jurusan IESP-Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

- Liliyanti. 2008. "Tindakan Penagihan Pajak dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)". Tesis Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Listyaningtyas, Ellya Florentin. 2012. "Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Kasus di KPP Tulungagung)". Jurnal Akuntansi UNESA Vol.1, No. 1.
- Marhaendi, Affan. 2012. "Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif dalam Usaha Mencairkan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Tamansari Satu Jakarta". *E-Journal Ekonomi Universitas Gunadarma*, 21 Mei 2012.
- Mustikaati, Linda. 2010. "Penagihan Pajak terhadap Tunggakan Pajak Studi Kasus di KPP Pratama Bandung-Cibeunying". Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nugraha, Irfan. 2011. "Analisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Senen". Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Indonesia.
- Nurkumaladewi. 2008. "Analisis Upaya Mengatasi Kendala Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Depok (Periode 2005-2006)". Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Purnawan, Amin. 2004. "Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan Aspek Keadilannya". Jurnal Hukum, Vol. 14, No.1, Januari 2004, Hal.33-51.
- Sari, Maria M. Ratna. 2012. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur". Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol. 7, No.1.
- Sihombing, English Chandra. 2009. "Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia". Skripsi Jurusan Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Syahab, M. Zakiah. 2012. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan. *E-Journal Ekonomi Universitas Gunadarma*.
- \_\_\_\_\_. 2008. Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. No.2 Vol. 13, Hal. 137-152.
- Wibowo, Ario Agung. 2010. "Upaya Kantor Pelayanan Pajak dalam Melakukan Penagihan Utang Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan)". Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Wijoyanti, Mayang. 2010. "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.